

STAKEHOLDER PENGELOLAAN WISATA ALAM SPTN WILAYAH II MAJALENGKA TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI (TNGC)

*(Stakeholders of Nature Tourism Management in SPTN Area II Majalengka, Gunung Ciremai
National Park)*

MITA ANINDISA¹⁾, SAMBAS BASUNI²⁾ DAN TUTUT SUNARMINTO³⁾

¹⁾ Mahasiswa Sarjana Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, IPB

^{2,3)} Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, IPB

Email: m.anindisa@gmail.com

Diterima 05 Oktober 2017 / Disetujui 27 Desember 2017

ABSTRACT

Ecotourism management in Gunung Ciremai National Park is fully managed by third party which are community organizations, state-owned enterprises, and non-governmental organizations. The aims of this research is to identify stakeholders, categorize stakeholders based on interests and influences, also to identify space and determine the level of stakeholder participation. The data obtained using questionnaire, interview, and direct observation were analyzed with stakeholder analysis matrix and the level of stakeholder participation. Fourteen stakeholders involved within the programs based on interests and influences are governmental institutions, cooperations, non-governmental organizations, and community organization with two classifications (key player and crowd). In this management there is no subject and context setter. Most of the stakeholders participate to control level in level of participation.

Keywords: ecotourism, interest and influence, level of participation, stakeholder

ABSTRAK

Pengelolaan wisata alam di TNGC hampir sepenuhnya dikelola pihak ketiga, baik oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi stakeholder, mengkategorikan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruh serta mengidentifikasi ruang dan menentukan tingkat partisipasi stakeholder. Data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi langsung dianalisis dengan menggunakan matriks analisis *stakeholder* dan tingkat partisipasi *stakeholder*. *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di SPTN Wilayah II Majalengka TNGC berdasarkan kepentingan dan pengaruh terdiri dari 14 *stakeholder* yang terdiri dari instansi pemerintah, badan usaha koperasi, lembaga swasta, dan kelompok masyarakat dengan dua klasifikasi yaitu *key player* dan *crowd*. Dalam pengelolaan ini tidak ada *subject* dan *context setter*. Sebagian besar *stakeholder* berpartisipasi sampai pada tingkat kontrol dalam tingkat partisipasi.

Kata kunci: kepentingan dan pengaruh, *stakeholder*, tingkat partisipasi, wisata alam

PENDAHULUAN

Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) ditetapkan sebagai kawasan taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 424/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi kelompok hutan lindung pada kelompok hutan Gunung Ciremai seluas 15.859,17 ha yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pengelolaan taman nasional dapat dikatakan belum efektif karena kegiatan perlindungan dan pengawetan lebih dominan dibandingkan pemanfaatan. Salah satu optimalisasi pemanfaatan yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan wisata.

Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) yang ada di TNGC hampir sepenuhnya dikelola oleh pihak ketiga, baik oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Milik

Swasta (BUMS) karena sebelum beralih fungsi menjadi taman nasional ODTWA tersebut sudah dikelola oleh pihak-pihak tersebut. Setiap pihak tersebut memiliki fungsi dan perannya yang berbeda sehingga perlu kerjasama setiap stakeholder dalam pengembangan wisata di TNGC.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam, mendapatkan kategori *stakeholder* tersebut berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya dalam pengelolaan wisata alam TNGC, serta mendapatkan ruang dan menentukan tingkat partisipasi *stakeholder* dalam pengelolaan wisata alam di SPTN Wilayah II Majalengka TNGC.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Majalengka, TNGC,

pada bulan Desember 2016-Februari 2017. Objek penelitian adalah *stakeholder* yang terlibat dengan kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan wisata di SPTN Wilayah II Majalengka, TNGC. Alat yang digunakan yaitu kuesioner, alat tulis, kamera, dan *tape recorder* (alat perekam).

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, kuesioner dan wawancara. Pengumpulan data kuesioner tertutup dengan nilai

persepsi menggunakan skoring skala Likert (1-7) yang dimodifikasi (1=sangat rendah, 2=rendah, 3=agak rendah, 4=sedang, 5=agak tinggi, 6=tinggi, 7=sangat tinggi) (Avenzora 2008).

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen berupa buku, laporan hasil kegiatan dan laporan lainnya seperti informasi kondisi umum penelitian. Secara ringkas jenis data dan metode pengumpulan data berdasarkan tujuan penelitian disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Jenis data dan metode pengumpulan data berdasarkan tujuan penelitian

No.	Tujuan penelitian	Variabel yang diukur	Metode pengumpulan data
1	Mendapatkan identitas <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di TNGC	Identitas <i>stakeholder</i>	Wawancara
2	Mendapatkan kategori <i>stakeholder</i> tersebut berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya dalam pengelolaan wisata alam di TNGC	Kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i>	Kuesioner
3	Mendapatkan ruang dan menentukan partisipasi <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan wisata alam di TNGC	Bentuk dan tingkat partisipasi <i>stakeholder</i>	Wawancara, observasi langsung dan penelusuran dokumen

Data diolah menggunakan analisis *stakeholder* berdasarkan besarnya kepentingan dan pengaruh untuk mengklasifikasikan *stakeholder* ke dalam *key player*, *subject*, *context setter*, dan *crowd* (Gambar 1). Groenendijk (2003) menyatakan bahwa terdapat dua atribut yang pada umumnya dipakai dalam menganalisis *stakeholder* yaitu kepentingan (*interests*) dan pengaruh (*influence*). Kepentingan dinyatakan sebagai atribut terpenting dalam analisis *stakeholder*. Kepentingan dapat bersifat simpatik terhadap tujuan maupun negatif. Selain itu kepentingan antar *stakeholder* sangat beragam. Pengaruh (*influence*) dinyatakan sebagai kekuatan (*power*) dari *stakeholder* terhadap tujuan untuk mengendalikan keputusan yang dipilih, memfasilitasi implementasi dari tujuan serta menghindari adanya pengaruh buruk terhadap tujuan. Pada penelitian ini pengukuran tingkat kepentingan *stakeholder* dilakukan berdasarkan empat kriteria yaitu tujuan *stakeholder* (UU No 41 tahun 1999), kolaborasi (Permenhut P19/Menhut-II 2004), serta manfaat dan harapan (Groenendijk 2003). Pengukuran tingkat pengaruh *stakeholder* dilakukan berdasarkan pada organisasi (*legal formal*), sumberdaya strategi (*strategic resources*), kepemilikan pengetahuan

spesialis (*possession of specialist knowledge*), dan posisi lobi (*negotiating position*) (Groenendijk 2003).

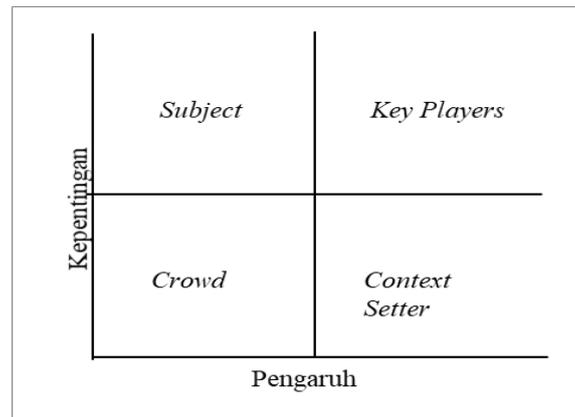
Analisis berikutnya yaitu analisis tingkat partisipasi *stakeholder* yang dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi *stakeholder* dalam pengelolaan wisata alam di TNGC. Analisis tingkat partisipasi dilakukan menggunakan matriks partisipasi terhadap siklus pengelolaan. Partisipasi *stakeholder* dianalisis dari tingkat yang terendah yaitu informasi, konsultasi/ perundingan, kemitraan dan control.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis *Stakeholder* Pengelolaan Wisata Alam di SPTN Wilayah II Majalengka TNGC

a. Identifikasi *stakeholder*

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat empat belas *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di SPTN Wilayah II Majalengka TNGC dan dapat dikelompokkan kedalam lima kelompok *stakeholder* yaitu instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha koperasi dan kelompok masyarakat (Tabel 2).

Gambar 1 Matriks pengaruh dan kepentingan (Reed *et al.* 2009)Tabel 2 *Stakeholders* pengelolaan wisata alam SPTN Wilayah II Majalengka Taman Nasional Gunung Ciremai

No.	Kelompok stakeholder	Stakeholder
1	Instansi pemerintah pusat	Taman Nasional Gunung Ciremai
2	Instansi pemerintah daerah	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Majalengka, Desa Argalingga, Argamukti, Sangiang, Padaherang dan Bantaragung
3	Lembaga swadaya masyarakat	Forum Ciremai
4	Kelompok masyarakat	Mitra Pariwisata Gunung Ciremai (MPGC) Buper Panten, MPGC Situ Sangiang, MPGC Buper Awi Lega, MPGC Buper Leles, MPGC Pendakian Jalur Apuy
5	Badan usaha koperasi	Koperasi Agung Lestari

b. Peran stakeholder

b.1 Instansi pemerintah pusat

TNGC merupakan unit pelaksana teknis dalam organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam melestarikan keseimbangan ekosistem serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kewenangan TNGC dalam pengelolaan wisata alam di SPTN Wilayah II Majalengka meliputi perlindungan dan pengamanan ODTWA, pemberdayaan masyarakat (kedaulatan masyarakat), serta penyediaan data dan informasi. ODTWA yang dikelola TNGC di antaranya Buper Panten, Situ Sangiang, Curug Cipeuteuy, Buper Awi Lega, Buper Leles, dan Pendakian Jalur Apuy (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai 2015).

b.2 Instansi pemerintah daerah

Disporabudpar merupakan instansi pemerintah dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Majalengka yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam bidang pariwisata. Peran Disporabudpar dan instansi pemerintah daerah lainnya dalam pengelolaan ODTWA di TNGC yaitu perlindungan dan pengamanan ODTWA, pembangunan sarana dan prasarana. Selain itu sesuai dengan visi misi Disporabudpar Kabupaten Majalengka juga mengembangkan sistem informasi dan

promosi terpadu (Renja Disporabudpar Kabupaten Majalengka 2011).

b.3 Lembaga swadaya masyarakat

Forum Ciremai adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk berdasarkan kepedulian terhadap ekosistem Gunung Ciremai. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Perkumpulan Forum Ciremai Nomor: SK.01/FC/7/2016 Forum Ciremai merupakan tempat untuk berpartisipasi aktif antar *stakeholder* di sekitar kawasan Gunung Ciremai untuk bersama-sama ikut serta mewujudkan kelestarian ekosistem Gunung Ciremai dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kondisi ekosistem berupa tata air, keindahan *landscape*, penyerapan karbon, keanekaragaman hayati dan *geothermal*. Peran Forum Ciremai dalam pengelolaan wisata di TNGC meliputi perlindungan sumberdaya, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan data dan informasi wisata alam.

b.4 Kelompok masyarakat

MPGC merupakan kelompok masyarakat hasil dari pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh TNGC dan bertugas mengelola objek wisata yang berada di SPTN Wilayah II Majalengka (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai 2015). Peran *stakeholder* kelompok masyarakat yaitu melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan ODTWA, serta penyediaan data dan informasi.

b.5 Badan usaha koperasi

Badan Usaha Koperasi (BUK) yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam di TNGC adalah Koperasi Agung Lestari. Sebelum terbentuk koperasi, kelompok masyarakat di Curug Cipeuteuy bernama Lembaga Model Desa Konsevasi (LMDK) Cipeuteuy berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bantaragung Nomor: 141.1/76/III/PEM.DES/2011. Semua dana untuk perawatan berasal dari kelompok yang didirikan oleh masyarakat sampai terbentuknya koperasi Agung Lestari. Koperasi Agung Lestari memiliki peran seperti halnya MPGC yaitu melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan ODTWA, serta penyediaan data dan informasi

c. Klasifikasi stakeholder

Setiap *stakeholders* memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda dalam pengelolaan wisata alam di TNGC. Kategori *stakeholder* dibedakan antar objek wisata yaitu Situ Sangiang, Jalur Pendakian Apuy, Bumi Perkemahan Panten, Curug Cipeuteuy, Bumi Perkemahan Awi Lega dan Bumi Perkemahan Leles.

c.1 Situ Sangiang

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Situ Sangiang yaitu MPGC Situ Sangiang, TNGC, Forum Ciremai, Disporabudpar dan Desa Sangiang. Nilai tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* pada objek wisata Situ Sangiang tersaji pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3 Tingkat kepentingan *stakeholder* Situ Sangiang

No.	Stakeholder	Kepentingan				Rata-rata
		K1	K2	K3	K4	
1	TNGC	6,67	7	7	6,67	6,83
2	MPGC Situ Sangiang	7	7	7	7	7,00
3	Forum Ciremai	7	6,67	7	7	6,92
4	Desa Sangiang	3	3,67	2,67	3,33	3,17
5	Disporabudpar	5,33	5,33	5,67	6,67	5,75

Keterangan: K1= tujuan *stakeholder*, K2=harapan, K3= kolaborasi, K4=manfaat

Tabel 4 Tingkat pengaruh *stakeholder* Situ Sangiang

No.	Stakeholder	Pengaruh				Rata-rata
		P1	P2	P3	P4	
1	TNGC	7	6,33	7	6,67	6,75
2	MPGC Situ Sangiang	7	5,33	7	7	6,58
3	Forum Ciremai	4,67	5,67	5	4,33	4,92
4	Desa Sangiang	3	2,33	1,33	1,67	2,08
5	Disporabudpar	6,33	6	5,67	6	6

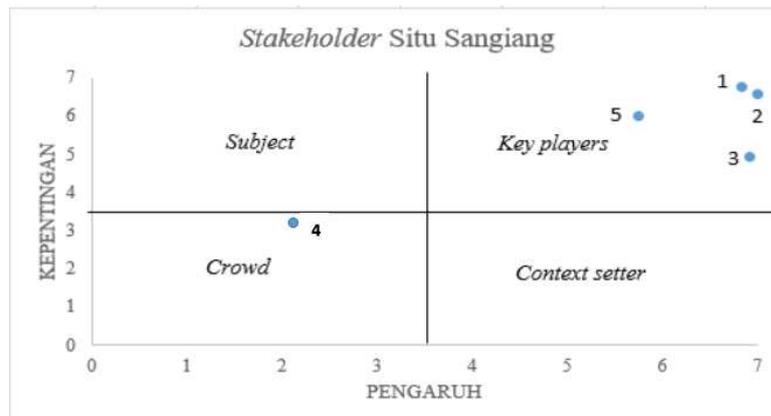
Keterangan: P1=organisasi (*legal formal*), P2=sumberdaya strategi (*strategic resources*), P3=kepemilikan pengetahuan spesialis (*possession of specialist knowledge*), P4=posisi lobi (*negotiating position*)

Desa Sangiang memiliki nilai kepentingan dan nilai pengaruh yang rendah yaitu 3,17 (agak rendah) dan 2,08 (rendah). Peran Desa Sangiang pada pengelolaan Situ Sangiang lebih bersifat partisipatif dan kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. *Stakeholder* yang memiliki nilai kepentingan yaitu MPGC Situ Sangiang dengan nilai 7,00 (sangat tinggi), sedangkan *stakeholder* yang memiliki nilai pengaruh tinggi yaitu TNGC dengan nilai 6,75 (tinggi). TNGC memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi karena merupakan pemilik kawasan. Kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keutuhan kawasan adalah dengan kegiatan patroli dan pengamanan secara rutin di objek wisata yang dilakukan oleh TNGC dan MPGC Situ Sangiang.

Posisi masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan objek wisata Situ Sangiang dimana *stakeholder* memiliki dua kategori yaitu *key players* dan

context setter (Gambar 2). Terdapat satu *stakeholder* yang termasuk ke dalam *crowd* yaitu Desa Sangiang yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. Hal ini karena Desa Sangiang tidak memiliki kemampuan secara penuh untuk mengelola Situ Sangiang.

Dalam pengelolaan Situ Sangiang terdapat *stakeholder* Disporabudpar yang bekerjasama dengan MPGC Situ Sangiang untuk menjaga peninggalan situs bersejarah yang terdapat di Situ Sangiang. Disporabudpar Kabupaten Majalengka melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata pada objek wisata Situ Sangiang yang sesuai dengan misinya yaitu mewujudkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai jati diri bangsa serta menciptakan produk wisata yang sesuai dengan pangsa pasar (Disporabudpar Kabupaten Majalengka 2011).



Keterangan: 1:TNGC, 2:MPGC Situ Sangiang, 3:Forum Ciremai, 4:Desa Sangiang 5:Disporabudpar Majalengka

Gambar 2 Matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder* di objek Situ Sangiang

c.2 Jalur Pendakian Apuy

Stakeholder pengelolaan yang terdapat di Jalur Pendakian Apuy di antaranya TNGC, MPGC Jalur Pendakian Apuy, Forum Ciremai dan Desa Argamukti. Nilai tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* di objek wisata Jalur Pendakian Apuy tersaji pada Tabel 5. dan Tabel 6. Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6, Desa Argamukti memiliki nilai kepentingan dan pengaruh yang rendah dengan masing-masing nilai 4,75 dan 4,75 (biasa saja). Hal ini karena Desa Argamukti tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Jalur Pendakian Apuy.

Kategori *stakeholder* dalam pengelolaan di objek Jalur Pendakian Apuy dalam matriks analisis *stakeholder* dapat dilihat pada Gambar 4. Pada Gambar 4 terdapat empat *stakeholder* dengan kategori *key players* atau memiliki nilai kepentingan dan pengaruh yang tinggi. *Key players* merupakan *stakeholder* yang paling aktif dalam pengelolaan karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu pengelolaan (Reed *et al.* 2009).

Tabel 5 Tingkat kepentingan *stakeholder* di Jalur Pendakian Apuy

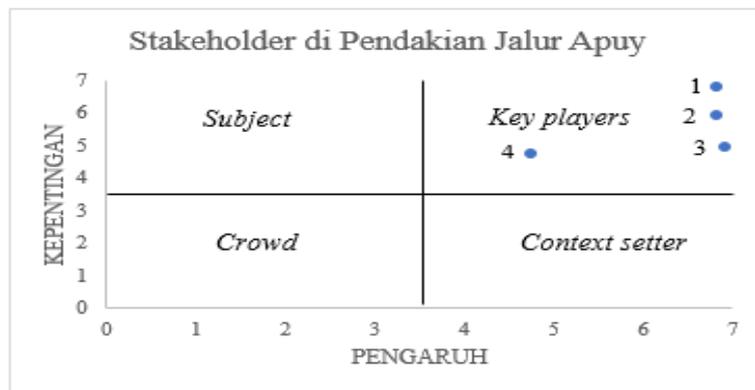
No.	<i>Stakeholder</i>	Kepentingan				Rata-rata
		P1	P2	P3	P4	
1	TNGC	6,67	7	7	6,67	6,83
2	MPGC Situ Sangiang	6,67	6,67	7	7	6,83
3	Forum Ciremai	7	6,67	7	7	6,92
4	Desa Argamukti	4,67	4	4,33	6	4,75

Keterangan: K1= tujuan *stakeholder*, K2=harapan, K3= kolaborasi, K4=manfaat

Tabel 6 Tingkat pengaruh *stakeholder* di Jalur Pendakian Apuy

No	<i>Stakeholder</i>	Pengaruh				Rata-rata
		P1	P2	P3	P4	
1	TNGC	7	6,33	7	6,67	6,75
2	MPGC Jalur Pendakian Apuy	7	6	5,67	5	5,92
3	Forum Ciremai	4,67	5,67	5	4,33	4,92
4	Desa Argamukti	6	4	4,67	4,33	4,75

Keterangan: P1=organisasi (*legal formal*), P2=sumberdaya strategi (*strategic resources*), P3=kepemilikan pengetahuan spesialis (*possession of specialist knowledge*), P4=posisi lobi (*negotiating position*)



Keterangan: 1:TNGC, 2:MPGC Jalur Pendakian Apuy, 3:Forum Ciremai, 4:Desa Argamukti

Gambar 3 Matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder* di objek Jalur Pendakian Apuy

c.3 Bumi Perkemahan Panten

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan objek Bumi Perkemahan Panten di antaranya MPGC Buper Panten, TNGC, Forum Ciremai dan Desa Argalingga. Nilai tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* di objek wisata Bumi Perkemahan Panten tersaji pada Tabel 7 dan Tabel 8. Berdasarkan Tabel 8, Forum Ciremai

memiliki nilai tingkat pengaruh yang sedang yaitu 4,92 (sedang). Pada Gambar 5 terdapat empat *stakeholder* yang termasuk kedalam kategori *key players* memiliki nilai kepentingan dan pengaruh yang tinggi di antaranya TNGC, MPGC Buper Panten, Desa Argalingga, dan Forum Ciremai.

Tabel 7 Tingkat kepentingan *stakeholder* di objek Bumi Perkemahan Panten

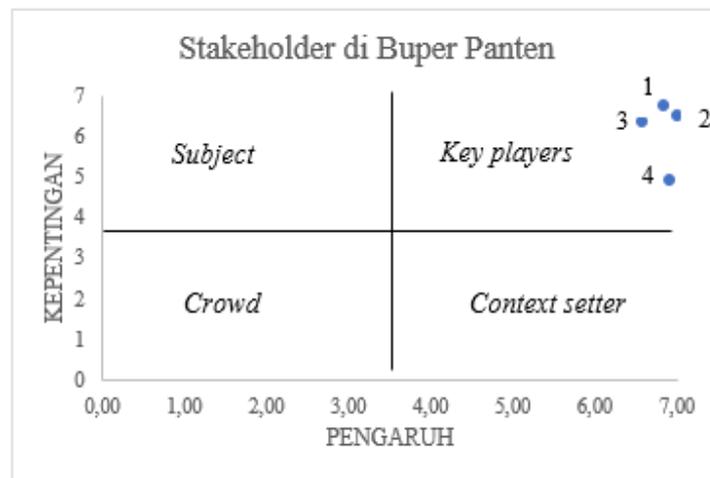
No	Stakeholder	Kepentingan				Rata-rata
		K1	K2	K3	K4	
1	TNGC	6,67	7	7	6,67	6,83
2	MPGC Buper Panten	7	7	7	7	7,00
3	Desa Argalingga	6,67	6,67	6,33	6,67	6,58
4	Forum Ciremai	7	6,67	7	7	6,92

Keterangan: K1= tujuan *stakeholder*, K2=harapan, K3= kolaborasi, K4=manfaat

Tabel 8 Tingkat pengaruh *stakeholder* di objek Bumi Perkemahan Panten

No	Stakeholder	Pengaruh				Rata-rata
		P1	P2	P3	P4	
1	TNGC	7	6,33	7	6,67	6,75
2	MPGC Buper Panten	7	5,33	7	6,67	6,5
3	Desa Argalingga	7	5,67	6,67	6	6,33
4	Forum Ciremai	4,67	5,67	5	4,33	4,92

Keterangan: P1=organisasi (*legal formal*), P2=sumberdaya strategi (*strategic resources*), P3=kepemilikan pengetahuan spesialis (*possession of specialist knowledge*), P4=posisi lobi (*negotiating position*)



Keterangan: 1:TNGC, 2:MPGC Buper Panten, 3:Desa Argalingga, 4:Forum Ciremai

Gambar 4 Matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder* di objek Buper Panten

c.4 Curug Cipeuteuy

Objek wisata Curug Cipeuteuy dikelola oleh Koperasi Agung Lestari dengan pihak-pihak lainnya yaitu TNGC, Forum Ciremai dan Desa Bantaragung. Nilai tingkat kepentingan dan pengaruh setiap *stakeholders* pada objek wisata Bumi Perkemahan Panten tersaji pada Tabel 9 dan Tabel 10. Berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 10, Desa Bantaragung memiliki nilai kepentingan dan pengaruh rendah yaitu 5,33 (agak tinggi) dan 4,92 (sedang). Hal ini karena Desa Bantaragung tidak terlibat langsung dalam

pengelolaan Curug Cipeuteuy, namun Desa Bantaragung menyediakan akses jalan menuju objek wisata. *Stakeholder* yang telah diketahui besarnya nilai kepentingan dan pengaruh kemudian dipetakan ke dalam matriks kepentingan dan pengaruh pada Gambar 6 yang dikategorikan menjadi empat. MPGC Curug Cipeuteuy merupakan pengelola objek wisata Curug Cipeuteuy yang kemudian telah berbadan hukum sehingga menjadi Koperasi Agung Lestari.

Tabel 9 Nilai kepentingan *stakeholder* pengelolaan objek Curug Cipeuteuy

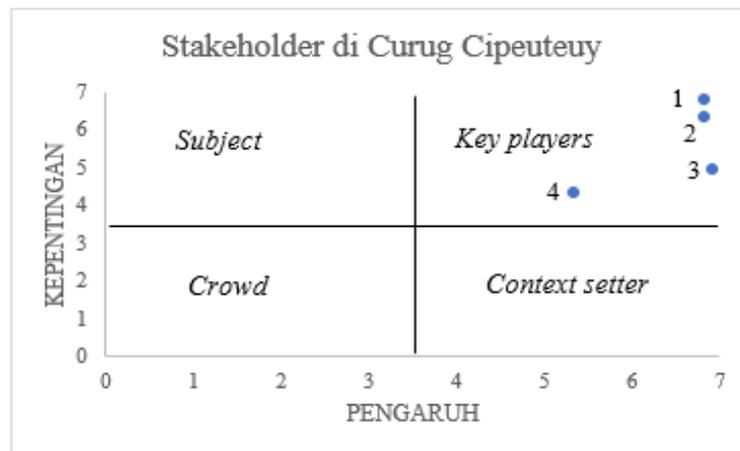
No	Stakeholder	Kepentingan				Rata-rata
		K1	K2	K3	K4	
1	TNGC	6,67	7	7	6,67	6,83
2	Koperasi Agung Lestari	7	6,67	6,67	7	6,83
3	Forum Ciremai	7	6,67	7	7	6,92
4	Desa Bantaragung	5	5,33	4,67	6,33	5,33

Keterangan: K1= tujuan *stakeholder*, K2=harapan, K3= kolaborasi, K4=manfaat

Tabel 10 Nilai pengaruh *stakeholder* pengelolaan objek Curug Cipeuteuy

No	Stakeholder	Pengaruh				Rata-rata
		P1	P2	P3	P4	
1	TNGC	7	6,33	7	6,67	6,75
2	MPGC Buper Panten	7	5,33	7	6,67	6,5
3	Desa Argalingga	7	5,67	6,67	6	6,33
4	Forum Ciremai	4,67	5,67	5	4,33	4,92

Keterangan: P1=organisasi (*legal formal*), P2=sumberdaya strategi (*strategic resources*), P3=kepemilikan pengetahuan spesialis (*possession of specialist knowledge*), P4=posisi lobi (*negotiating position*)



Keterangan: 1:TNGC, 2:Koperasi Agung Lestari, 3:Forum Ciremai, 4:Desa Bantaragung

Gambar 5 Matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder di objek Curug Cipeuteuy

c.5 Bumi Perkemahan Awi Lega

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata Bumi Perkemahan Awi Lega di antaranya MPGC Buper Awi Lega, TNGC, Forum Ciremai dan Desa Bantaragung. Nilai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pada objek wisata Bumi Perkemahan Panten tersaji pada Tabel 11 dan Tabel 12. Nilai pengaruh Desa Bantaragung pada objek Bumi Perkemahan Awi Lega memiliki nilai yang rendah yaitu 4,33 dengan kategori

sedang, karena Desa Bantaragung tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Buper Awi Lega. Stakeholder yang telah diketahui besarnya nilai kepentingan dan pengaruh kemudian dipetakan ke dalam matriks kepentingan dan pengaruh pada Gambar 7. Berdasarkan Gambar 7, seluruh stakeholder objek wisata ini berada pada kategori key players yang mempunyai nilai kepentingan dan pengaruh yang tinggi.

Tabel 11 Nilai kepentingan stakeholder pengelolaan objek Bumi Perkemahan Awi Lega

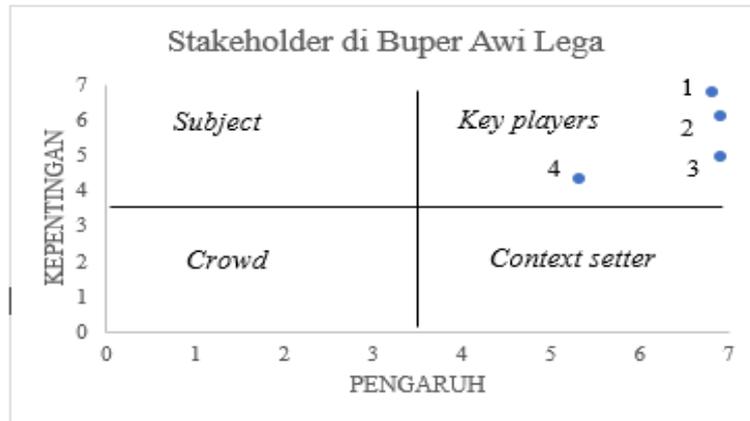
No	Stakeholder	Kepentingan				Rata-rata
		K1	K2	K3	K4	
1	TNGC	6,67	7	7	6,67	6,83
2	MPGC Buper Awi Lega	6,67	7	7	7	6,92
3	Forum Ciremai	7	6,67	7	7	6,92
4	Desa Bantaragung	5	5,33	4,67	6,33	5,33

Keterangan: K1= tujuan stakeholder, K2=harapan, K3= kolaborasi, K4=manfaat

Tabel 12 Nilai pengaruh stakeholder pengelolaan objek Bumi Perkemahan Awi Lega

No	Stakeholder	Pengaruh				Rata-rata
		P1	P2	P3	P4	
1	TNGC	7	6,33	7	6,67	6,75
2	MPGC Buper Awi Lega	6	5,33	7	6	6,08
3	Forum Ciremai	4,67	5,67	5	4,33	4,92
4	Desa Bantaragung	4,33	4	4,33	4,67	4,33

Keterangan: P1=organisasi (legal formal), P2=sumberdaya strategi (strategic resources), P3=kepemilikan pengetahuan spesialis (possession of specialist knowledge), P4=posisi lobi (negotiating position)



Keterangan: 1: TNGC, 2: MPGC Buper Awi Lega, 3: Forum Ciremai, 4: Desa Bantaragung

Gambar 6 Matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder* di objek Bumi Perkemahan Awi Lega

c.6 Bumi Perkemahan Leles

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan objek Bumi Perkemahan Leles di antaranya TNGC, Forum Ciremai dan Desa Padaherang. Pengelolaan yang dilakukan masih sangat terbatas, karena belum tersedianya fasilitas yang terdapat di Buper Leles. Nilai tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* pada objek wisata Bumi Perkemahan Panten tersaji pada Tabel 13 dan Tabel 14. Berdasarkan Tabel 14, nilai kepentingan Desa Padaherang memiliki nilai 4,08 (biasa saja). Hal ini karena Desa Padaherang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Bumi Perkemahan Leles. *Stakeholder* yang telah diketahui besarnya nilai kepentingan dan pengaruh kemudian dipetakan ke dalam matriks kepentingan dan pengaruh pada Gambar 7.

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Buper Leles yaitu TNGC, MPGC Buper Awi Leles, Forum Ciremai, dan Desa Padaherang. Seluruh *stakeholder* objek wisata ini berada pada kategori *key players* yang mempunyai nilai kepentingan dan pengaruh yang tinggi.

ODTWA yang terdapat di SPTN Wilayah II Majalengka terdapat enam objek wisata, terdapat satu *stakeholder* masuk kedalam kategori *context setter* yaitu Desa Sangiang. Menurut Damanik dan Weber (2006) pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata dan bertanggung jawab dalam menentukan pariwisata. Kebijakan yang dilakukan pemerintah merupakan acuan bagi *stakeholder* yang lain dalam melakukan peran dan fungsinya.

Tabel 13 Nilai kepentingan *stakeholder* pengelolaan objek Bumi Perkemahan Leles

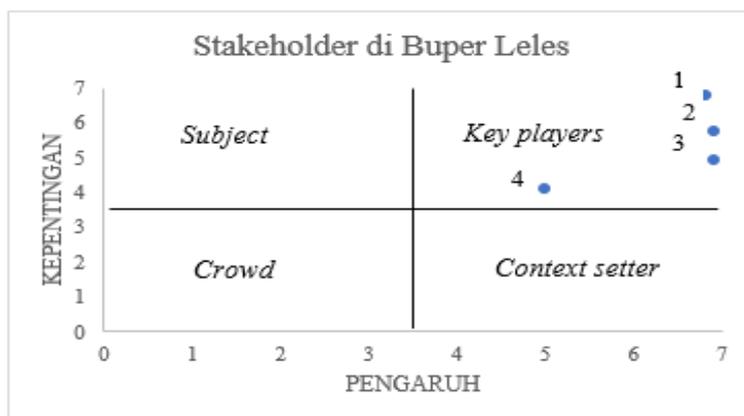
No	Stakeholder	Kepentingan				Rata-rata
		K1	K2	K3	K4	
1	TNGC	6,67	7	7	6,67	6,83
2	MPGC Buper Leles	6,67	7	7	7	6,92
3	Forum Ciremai	7	6,67	7	7	6,92
4	Desa Padaherang	4,67	4,33	4,33	6,67	5,00

Keterangan: K1= tujuan *stakeholder*, K2=harapan, K3= kolaborasi, K4=manfaat

Tabel 14 Nilai pengaruh *stakeholder* pengelolaan objek Bumi Perkemahan Leles

No	Stakeholder	Pengaruh				Rata-rata
		P1	P2	P3	P4	
1	TNGC	7	6,33	7	6,67	6,75
2	MPGC Buper Leles	5	7	7	4	5,75
3	Forum Ciremai	4,67	5,67	5	4,33	4,92
4	Desa Padaherang	4,67	3,33	4,67	3,67	4,08

Keterangan: P1=organisasi (*legal formal*), P2=sumberdaya strategi (*strategic resources*), P3=kepemilikan pengetahuan spesialis (*possession of specialist knowledge*), P4=posisi lobi (*negotiating position*)



Keterangan: 1:TNGC, 2: MPGC Buper Leles, 3:Forum Ciremai, 4: Desa Padaherang

Gambar 7 Matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder* di objek Bumi Perkemahan Leles

2. Analisis Tingkat Partisipasi Stakeholders

a. Aktivitas *stakeholders*

Pengelolaan taman nasional, berasaskan tiga pilar konservasi yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari. Dalam pengelolaannya, aspek perlindungan dan aspek pengawetan yang dilakukan di taman nasional lebih dominan, sedangkan aspek pemanfaatan belum banyak dilakukan. Aktivitas stakeholder dilakukan berdasarkan pengelolaan konservasi yang dilakukan masing-masing stakeholder terhadap aspek konservasi tersebut.

Aktivitas stakeholder pada masing-masing objek wisata sangat beragam. Balai TNGC sebagai instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan Gunung Ciremai secara keseluruhan. Kelompok masyarakat atau MPGC bertanggung jawab mengelola objek wisata yang ada di SPTN Wilayah II Majalengka. Forum Ciremai merupakan wadah partisipasi aktif para pihak di sekitar kawasan Gunung Ciremai untuk secara bersama-sama ikut serta mewujudkan kelestarian ekosistem Gunung Ciremai dan kesejahteraan masyarakat.

a.1 Aspek perlindungan

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TNGC dan MPGC pada setiap ODTWA melakukan aspek perlindungan dengan patroli pengamanan objek wisata, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, pengawasan jalur pendakian dan pengamanan ekosistem kawasan Gunung Ciremai.

a.2 Aspek pengawetan

Dalam aktivitas aspek pengawetan, TNGC melakukan penanaman massal bersama masyarakat untuk memperbaiki ekosistem Gunung Ciremai. Selain itu, TNGC melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan sebaran spesies kunci tumbuhan dan satwa liar. Kegiatan lainnya yang dilakukan TNGC untuk menjaga ekosistem yaitu pengawetan keanekaragaman plasma nutfah (sumberdaya genetik) tumbuhan dan satwa liar.

a.3 Aspek Pemanfaatan

Kegiatan pada aspek pemanfaatan (UU No 5 Tahun 1990) banyak dilakukan oleh semua *stakeholder* yang terlibat di antaranya TNGC, kelompok masyarakat (MPGC) masing-masing ODTWA. Aktivitas yang dilakukan *stakeholder* pada aspek pemanfaatan yaitu memanfaatkan potensi di kawasan taman nasional sebagai objek wisata.

b. Ruang partisipasi *stakeholders*

Berdasarkan hasil analisis didapatkan delapan ruang partisipasi yang diklasifikasikan berdasarkan tahapan pengelolaan mulai dari inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Rekapitulasi ruang partisipasi *stakeholders* disajikan pada Tabel 15. Tabel 15 menunjukkan bahwa pengelolaan wisata alam di SPTN Wilayah II Majalengka sudah terpenuhi dari tahapan pengelolaan. Hal ini dapat dilihat dari tahapan pengelolaan mulai dari identifikasi/inventarisasi sampai monitoring dan evaluasi sudah ada di dalam pengelolaan. Namun, upaya-upaya partisipasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholder* akan terus dilakukan sebagai bentuk keikutsertaan dan kontribusi dalam pengelolaan wisata alam. Selanjutnya, rekapitulasi ruang partisipasi *stakeholder* ini digunakan untuk menganalisis tingkat partisipasi *stakeholder*.

Tabel 15 Rekapitulasi ruang partisipasi *stakeholder* dalam pengelolaan wisata

No	Ruang partisipasi	Tahapan pengelolaan			
		I	P	A	C
1	Perlindungan dan pengamanan ekosistem kawasan	-	-	✓	-
2	Penataan dan pembangunan sarana dan prasarana	-	✓	✓	-
3	Pelatihan SAR, P3K dan <i>survival</i>	-	-	✓	-
4	Pengembangan pemasaran pariwisata	✓	✓	✓	-
5	Pengembangan destinasi pariwisata	✓	✓	✓	-
6	Rapat koordinasi terkait peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	-	-	✓	-
7	Pengembangan kerjasama dengan pihak lain	✓	✓	✓	-
8	Monitoring dan evaluasi	-	-	-	✓

Keterangan: I: *Inventory* (inventarisasi); P: *Planing* (perencanaan); A: *Action* (pelaksanaan); C: *Controlling* (pemantauan dan evaluasi).

c. Tingkat partisipasi *stakeholders*

Partisipasi merupakan kunci sukses dalam mewujudkan pengelolaan wisata (Kassa 2009). Hasil analisis tingkat partisipasi *stakeholder* terhadap tahapan pengelolaan tersaji pada Tabel 16. Berdasarkan Tabel 16 terdapat enam *stakeholder* pada tingkat informasi. Seluruh *stakeholder* yang berada pada tingkat ini berpartisipasi pada tahap pelaksanaan. *Stakeholder* instansi pemerintah daerah berpartisipasi dalam penataan dan pembangunan sarana prasarana serta mendapatkan

informasi mengenai pengelolaan wisata yang berada di masing-masing desa, sementara Disporabudpar Kabupaten Majalengka masih merencanakan kebijakan-kebijakan untuk pengembangan wisata kedepannya yang sesuai dengan bidang tupoksinya yang dapat berpengaruh dalam pengelolaan. Dalam pelaksanaannya Disporabudpar berganti nama menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar lebih fokus terhadap pengelolaan wisata yang ada di Kabupaten Majalengka.

Tabel 16 Tingkat partisipasi *stakeholder*

Tahapan pengelolaan	Tingkat partisipasi			
	Informasi	Konsultasi/ perundingan	Kemitraan	Kontrol
Inventarisasi	-	-	TNGC, FC, Disporabudpar	-
Perencanaan	-	TNGC, BP, SS, KAL, BL, PJA, BAL, FC	TNGC, FC, Disporabudpar	-
Pelaksanaan	Disporabudpar, KAM, KA, KS, KPH, KBA	TNGC, BP, SS, KAL, BL, PJA, BAL, FC	SS, TNGC, FC Disporabudpar	TNGC, BP, SS, KAL, BL, PJA, BAL
Pemantauan dan Evaluasi		-	-	TNGC, FC,

Keterangan: Buper Panten (BP), Situ Sangiang (SS), Koperasi Agung Lestari (KAL), Buper Leles (BL), Pendakian Jalur Apuy (PJA), Buper Awi Lega (BAL), Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata (Disporabudpar), Forum Ciremai (FC), Kepala Desa Argamukti (KAM), Kepala Desa Argalingga (KA), Kepala Desa Sangiang (KS), Kepala Desa Padahaerang (KPH), dan Kepala Desa Bantaragung (KBA).

Pada tingkat konsultasi/perundingan terdapat delapan *stakeholder*. *Stakeholder* tersebut mengadakan perundingan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta memberikan arahan kepada pengelola wisata terkait dengan pengelolaan wisata ke depannya.

Terdapat empat *stakeholder* pada tingkat kemitraan. Pada tahap inventarisasi terdapat tiga *stakeholder* di

antaranya TNGC, FC dan Disporabudpar. Ketiga *stakeholder* melakukan inventarisasi berupa kajian sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar objek wisata untuk mendapatkan manfaat yang berkelanjutan. Pada tahap perencanaan kemitraan terdiri dari TNGC, FC dan Disporabudpar, sementara pada tahap pelaksanaan terdapat empat *stakeholder*. Kemitraan yang dilakukan

oleh MPGC dan Kepala desa masing-masing objek wisata yaitu adanya Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan tiket masuk pengunjung. Kemitraan yang dilakukan oleh Disporabudpar dengan MPGC Situ Sangiang yaitu adanya Surat Perjanjian tahun 2015 tentang pekerjaan pengelola objek wisata alam Sangiang Kabupaten Majalengka.

Pada tingkat kontrol terdapat delapan *stakeholder*. Pada tahap pelaksanaan terdapat tujuh *stakeholder*. Kelompok masyarakat (MPGC) dalam pelaksanaannya memegang kontrol penuh karena *stakeholder* ini merupakan pengelola yang memegang tanggung jawab terhadap pengelolaan ODTWA. Menurut Nanang dan Devung (2004) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan perlu memerhatikan beberapa tolok ukur untuk menjadi prasyarat agar suatu partisipasi dapat disebut sebagai partisipasi yang sesungguhnya atau partisipasi tertinggi. Adanya inisiatif sendiri dari masyarakat, jika perlu dengan bimbingan dari orang luar. Masyarakat memegang kontrol atas keputusan dan pemanfaatan sumberdaya, pihak luar memfasilitasi masyarakat (Kassa 2009).

SIMPULAN

Berdasarkan klasifikasi stakeholder pengelolaan wisata di TNGC dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu *key player*, *crowd* dan *context setter*. Setiap stakeholder berpartisipasi sampai pada tingkat kontrol dalam tahapan pengelolaan. Tingkat partisipasi stakeholder di SPTN Wilayah II Majalengka sudah meliputi empat tingkatan partisipasi yaitu informasi, konsultasi/perundingan, kemitraan, dan kontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein SR. 1969. A ladder of citizen participation. *JAIP*. 35(4):216-224.
- Avenzora R. 2008. Ekoturisme - evaluasi tentang konsep. Di dalam: Ricky Avenzora, editor. *Ekoturisme - Teori dan Praktek*. Aceh (ID): BRR NAD-Nias
- [BTNGC] Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 2015. *Rencana strategis balai taman nasional gunung ciremai tahun 2015-2019*. Kuningan (ID): Balai Taman Nasional Gunung Ciremai.
- Damanik J, Weber H. 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta (ID): PUSPAR UGM dan Andi
- [DEPHUT] Departemen Kehutanan. 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- [DISPORABUDPAR] Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Majalengka. 2011. *Rencana kerja Disporabudpar*. Majalengka (ID): Disporabudpar.
- Groenendijk L. 2003. *Planning and Management Tools*. Netherland (AN): The International Institute for Geo-Information Science and Earth
- Kassa S. 2009. Konsep pengembangan *co-management* untuk melestarikan taman nasional lore lindu [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Nanang M dan Devung GS. 2004. *Panduan Pengembangan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan*. Yokohama(JP): Institute for Global Environmental Strategies (IGES).
- Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris, J, Presll C, Quinn CH, Stringer LC. 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environment Management*. 90:1933-1949.